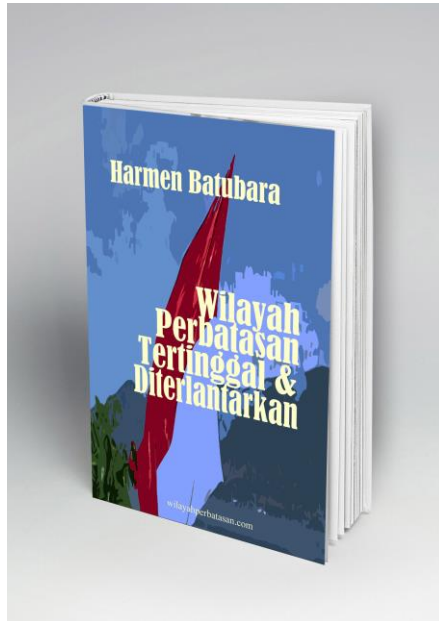


HARMEN BATUBARA

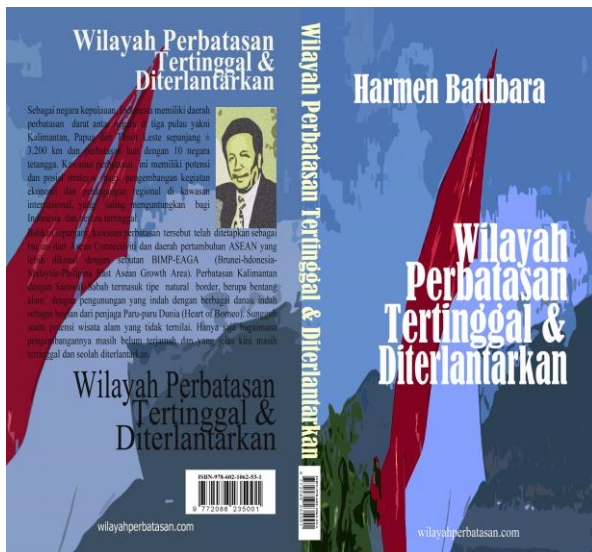


ISBN-978-602-1062-53-1

Wilayahperbatasan.com

Copyright © 2016 by harmen batubara

Wilayah Perbatasan Tertinggal & Diterlantarkan



Wilayahperbatasan.com
JI Riung Mungpulung Raya No 15 Riung Bandung
Telepon 022-7565012
Bandung 40295
harmenbatubara@gmail.com
© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
All Rights Reserved

Kata Pengantar

Sejauh yang kita pahami, pengenalan terhadap wilayah perbatasan masih sangat terbatas, apalagi pengembangannya. Kawasan perbatasan relatif masih kurang mendapat perhatian, bahkan meski sudah dalam era reformasi dan zaman otonomi daerah seperti saat ini, pola pemerintahan masih bersifat sentralistik. Hal ini lah yang menyebabkan kawasan perbatasan menjadi 'daerah belakang' dari Indonesia. Keadaan ini menimbulkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, kesenjangan sosial, ekonomi dan teknologi dengan negara tetangga.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki daerah perbatasan darat antar negara yang cukup panjang, yaitu sepanjang ± 3.200 km. Kawasan perbatasan antar negara ini memiliki potensi yang potensial dan strategis bagi perbatasan lewat pengembangan kegiatan perdagangan internasional, yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan negara tetangganya. Bahkan sepanjang kawasan perbatasan tersebut secara internasional telah ditetapkan sebagai bagian dari Asean Connectivity serta daerah pertumbuhan ASEAN Timur yang lebih dikenal dengan sebutan BIMP-EAGA (Brunei-hondonesia- Malaysia-Philipina East Asean Growth Area).

Perbatasan Kalimantan dengan Serawak termasuk dalam tipe natural border, perbatasan yang ditandai oleh bentang alam yaitu pengunungan Kapuas Hulu. Kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Menurut para ekonom perbatasan setidaknya terdapat dua kekuatan besar yang bisa disumbangkan oleh kawasan perbatasan terhadap perekonomian di sekitarnya. Pertama, dengan akses perdagangan yang dimiliki, kawasan perbatasan merupakan pintu masuk barang dan jasa; mengalmiya devisa ke dalam negeri. Kedua, perdagangan yang sehat yang terjadi di perbatasan akan mendorong tumbuhnya produksi di dalam negeri.

Hal inilah yang jadi pendorong bagi penulis untuk menerbitkan buku ini, yakni untuk memperkenalkan wilayah perbatasan darat Indonesia. Karena tanpa mengenal wilayah perbatasan maka sulit pula untuk mengetahui potensinya. Sebagai pemerhati perbatasan penulis sangat setuju untuk menggali potensi eko nomi perbatasan yakni potensi yang mengga bungkan antara ekonomi geografi dan ilmu ekonomi untuk mempelajari proses pembangunan di kawasan perba tasan yang terdiri paling tidak dua daerah dengan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang berbeda.

Terdapat beberapa alasan mengapa studi tentang ekonomi perbatasan menjadi relatif penting, yaitu antara lain:

Suatu kenyataan bahwa kebanyakan kawasan perbatasan terletak jauh dari pusat aktivitas

ekonomi sehingga timbul kecenderungan menjadi kawasan yang tertinggal; Adanya hambatan administrasi dalam lalu lintas antar barang dan orang sehingga kawasan perbatasan yang pada dasarnya homogen menjadi heterogen; dan Berkaitan dengan trend globalisasi saat ini yang mendorong perekonomian menjadi tanpa batas.

Karena itulah hemat penulis sangat penting bagi warga atau siapapun mereka yang tertarik akan kawasan perbatasan untuk mengetahui perbatasan darat kita itu seperti apa? Bagaimana sejarahnya batas itu ditetapkan, ditegaskan kembali dan dipelihara serta dikembangkan. Itulah yang menjadi pendorong penulis untuk menuliskan buku ini.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat, para kawan dan teman yang telah banyak memberikan masukan, khususnya bagaimana meramu dan menyajikan tulisan terkait perbatasan ini; dengan harapan bisa jadi lebih menarik dan bermakna.

Harmen Batubara

Daftar Isi	Halaman
Daftar Isi	Hal
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	6
Salam Dari Perbatasan	11
Konteks Strategis Wilayah Perbatasan	16
Kerjasama Antar Negara	18
BAB I SEKAPUR SIRIH	21
1.Latar Belakang	21
2.Yang Ingin Disampaikan Dengan Buku ini	24
3. Cara Bertutur	25
4. Sistimatika Penulisan.	25
5. Pengertian-Defenisi	26
Menjadikan Wilayah Perbatasan Jadi Halaman Depan Bangsa	31

BAB II PENETAPAN GARIS BATAS NEGARA	43
6. Penetapan Garis Batas Republik Indonesia- Malaysia	43
7. Penetapan Garis Batas Republik Indonesia-Papua New Guinea	45
8. Penetapan Garis Batas Republik Indonesia-Timor Leste	53
Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan BNPP Terlihat Masih Sangat Inward Looking	57
Perbatasan Dalam Konstek Pembangunan 6 Koridor Ekonomi Nasional serta Konektivitas Asean.	62
BAB III PENEGASAN GARIS BATAS NEGARA	72
9. Penegasan Garis Batas Republik Indonesia – Malaysia	72
9.1. Metode Penegasan Batas	77
9.2 Hasil Survei Bersama.	84
9.3 Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM)	84
10. Penegasan Batas Republik Indonesia(ri)-Papua New Guinea (PNG)	86
10.1. Teknik/Metode Pengukuran	

Tugu MM	92
10.2 Hasil Survei Penegasan Batas	103
11. Penegasan Batas Republik Indonesia-Timor Leste	113
12. Hasil penegasan perbatasan antara RI-RDTL	122
Sekilas Tentang Penanganan Tegas Batas Antar Negara Selama Ini	123
BAB IV PERMASALAHAN GARIS BATAS DAN ISSU PERBATASAN	144
13. Permasalahan Garis Batas Republik Indonesia-Malaysia	144
14. Permasalahan Batas di Sektor Barat (Kal Barat-Sarawak)	145
15. Permasalahan Batas di Sektor Timur (Kal Timur,Kal Utara-Sabah)	150
16. Permasalahan Batas Indonesia – Papua New Guinea	155
17. Permasalahan Batas Indonesia-Timor Leste	157
18. Yang Jadi Berita Terkait Perbatasan	161
18.1. Permasalahan batas negara antara Indonesia dan Malaysia	162
18.2. Isu Perbatasan Indonesia – Papua NewGuinea	165
18.3. Isu Masalah Perbatasan Indonesia	

– Timor Leste	167
Wilayah Perbatasan Dari Sisi Konektivitas Infrastruktur Asean	174

BAB V PROFIL KABUPATEN PERBATASAN 179

19. Batas Negara Indonesia – Malaysia	179
20. Profil Perbatasan Kalimantan Barat dalam Lokasi Prioritas Kalimantan Barat	181
21. Profil Perbatasan Kalimantan Utara dalam Lokasi Prioritas Kalimantan Utara	240
22. Profil Perbatasan Kalimantan Timur dalam Lokasi Prioritas Kalimantan Timur	260
23. Profil Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea	272
24. Profil Perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste	344
Pengembangan Ekonomi di Wilayah Perbatasan, Bangun Infrastrukturnya	386

BAB VI PENUTUP 399

25. Menghadirkan Negara di Perbatasan	399
---------------------------------------	-----

26. Kebijakan Pemeliharaan Batas Darat	401
27. Titik batas sebagai bagian integral dari garis perbatasan	403
Daftar Bacaan	409
Riwayat Singkat Penulis	411

Salam Dari Perbatasan

Secara geografi Indonesia merupakan Negara terbesar ke lima di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik) merupakan jantung perdagangan di belahan dunia timur. Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara sahabat yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai

halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia. Karena itu tidak diragukan lagi Garis Perbatasan mempunyai arti penting dalam pembangunan kedaulatan negara.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara kebersamaan, pemanfaatan sum berdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau terluar sampai saat ini masih merupakan wilayah yang terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakat masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan.

Arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (*inward looking*) menjadi keluar (*outward looking*). Paradigma pengelolaan secara “*outward looking*” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karakteristik

yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namun sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif, mulai Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan serta Desa. Pola penanganan tersebut dapat di jabarkan melalui penyusunan berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintahan daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional sesuai dengan fungsi masing-masing sektor.

Fungsi pertahanan negara memiliki peran yang vital, yakni salah satu pilar berdiri tegaknya negara. Fungsi pertahanan negara tidak sekedar memper lengkapi diri dengan Alutsista yang modern akan tetapi melalui suatu Strategi Pertahanan Negara yang efektif dalam mendayagunakan segenap sumber daya pertahanan bagi perwujudan daya tangkal (deference capability) yang mampu meniadakan setiap bentuk ancaman. Walaupun selama ini yang terlihat sektor

pertahanannya yang lebih menonjol, sebenarnya hal itu dikarenakan lemahnya sektor non pertahanan itu sendiri; misalnya petugas negara non pertahanan yang di tugaskan ke wilayah perbatasan umumnya tidak ada yang berjalan secara efektif dan tugasnya tidak sampai di perbatasan tetapi mereka tetap menerima gaji secara utuh.

Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan misi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks.

Belum tuntasnya penegasan dan penetapan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah

masalah sensitip yang sulit dikompromikan. Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persolan batas di Laut China Selatan. Disamping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komprehensif yang dipadukan dengan pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Konteks Strategis Wilayah Perbatasan

Dengan merebaknya isu-isu keamanan non-tradisional, telah menimbulkan implikasi dalam pola interaksi internasional. Implikasi tersebut berupa terjadinya perubahan tata hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan yang harus di kaitkan dengan berbagai penyelesaian permasalahan global maupun regional, baik dalam konteks pengaturan tata hubungan antar negara maupun dalam pola pengaturan keamanan internasional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan nasional.

Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang

berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Keterpurukan ekonomi, gejolak politik domestik terganggunya keamanan dan semakin tajamnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat telah memicu konflik komunal, banyak di pengaruhi oleh kecenderungan lingkungan strategis secara signifikan. Kondisi tersebut senantiasa berubah dengan cepat dan penuh ketidak pastian, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan nasional yang pada dasarnya menjadi tumpuan bagi kelangsungan pembangunan di semua aspek kehidupan nasional.

Pada tingkat global, perkembangan demokrasi menjadi indikator penting dan universal dalam mengontrol kehidupan politik negara-negara berkembang, sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran kemanusiaan (HAM) dan mendorong upaya perdamaian global. Dengan semakin besarnya peran PBB dan masuknya Indonesia dalam jajaran Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB serta jadi kelompok G-20, membuka peluang bagi upaya baru dan revitalisasi PBB dalam mengatasi sejumlah konflik di berbagai kawasannya khususnya di negara berkembang di kawasan Asia tenggara dan Asia Timur.

Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong

kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan transnasional termasuk terorisme dapat di atasi secara signifikan dan tergolong mengalami kemajuan, sehingga dunia internasional semakin memberikan perhatiannya dalam mendukung mempertahankan stabilitas di kawasan.

Sedangkan pada tingkat nasional, perkembangan demokrasi mengalami kemajuan pesat dan masyarakat mulai semakin dewasa dalam menentukan sikap politiknya, sehingga melahirkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan pembangunan ekonomi dan keamanan serta pemeliharaan lingkungan berkaitan dengan terjadinya berbagai krisis dan bencana alam. Tersedianya cadangan dan potensi sumberdaya nasional yang memadai, dapat diolah dan di dayagunakan sedemikian rupa dalam rangka kepentingan terselenggaranya pembangunan nasional dan pertahanan negara di masa depan.

Kerjasama Antar Negara Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub Regional maupun Regional. Kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub regional yg ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singapura – Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Development Area (AIDA), maupun Brunai Indonesia Malaysia Philipina – East Asian Growth Area.

Pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namun demikian bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan yang tertinggal dan terisolir. Ini disebabkan karena berkembangnya kawasan perbatasan sangat lambat karena kurangnya pemahaman dan realitas kawasan perbatasan yang kian berkembang. Kalau wilayah perbatasannya sudah maju tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.

Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi

pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkoba, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum di laksanakan secara optimal. Di beberapa daerah kepulauan misalnya kepulauan Riau, Sangihe dan talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, masih banyak nelayan asing terutama dari Thailand dan philipina yg melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin karena ketidak tahuan batas laut antara kedua negara. Pembicraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu di lakukan, mengingat sumberdaya yang telah di curi selama ini merugikan negara dalam jumlah yg cukup besar.

Semua itu dan dalam rangka memelihara, memba ngun dan memperkuat keutuhan wilayah Negara, mening katkan kesejahteraan masyarakat maka sudah selayaknya kita dapat memperlihatkan perbatasan negara secara benar. Dengan mengetahui batas yang benar maka barulah bisa untuk lebih memperhatikan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa menghubungkan wilayah NKRI dengan dunia luar. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran secara utuh wilayah negara yang terkait wilayah perbatasan mulai dari garis batas, tugu-tugu batas, pos-pos lintas batas serta berbagai asesori perbatasan lainnya seperti jalan raya, jalan inspeksi, jalan tikus ,

Papan Nama, Gapura dan sosok atau Beacon. Buku ini juga akan memperlihatkan bagaimana assets perbatasan tersebut di pelihara, dikembangkan dan bagaimana peran Pos-pos lintas batas selama ini dioptimalkan dalam pengamanan dan memberikan rasa aman di wilayah perbatasan dan semua itu di uraikan serta di untaikan dengan berbagai permasalahan perbatasan dan isu-isu yang berkembang dari sana.

Tentu saja Buku ini masih jauh dari sempurna namun demikian akan terus diupayakan agar dapat menampilkan realitas maupun kondisi batas di perbatasan. Diyakini materi dan penyajian dalam penulisan buku terkait perbatasan ini masih sangat sederhana dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Karena itu masih diperlukan bantuan para pihak khususnya pemerintah daerah, Kodam perbatasan, instansi terkait dan masyarakat di wilayah perbatasan untuk ikut serta memberikan dan melengkapinya dengan berbagai informasi yang telah ada.

Sebagai akhir kata, di sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku perbatasan ini sehingga bisa sampai ke tangan anda.

WilayahPerbatasan.Com